

PENILAIAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI

SOSIALISASI FCP, IEPK & FRA – DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

BOGOR – 12 JUNI 2024

DATA DIRI



INDAH PRATIWI

AUDITOR MUDA
PERWAKILAN BPKP
PROVINSI JAWA BARAT

"Kemampuan terbesar kita sebagai manusia bukanlah untuk mengubah dunia; tetapi untuk mengubah diri kita sendiri."

-Mahatma Gandhi



GAMBARAN UMUM

Apa itu IEPK

IEPK adalah upaya mengukur kemajuan “pengelolaan” risiko korupsi demi menajamkan strategi pengawasan atas masalah korupsi

Melalui pengukuran IEPK, nilai tambah pengawasan pengendalian korupsi di dalam organisasi publik berusaha ditingkatkan. Pengukuran bukan hanya soal memberikan predikat kinerja pengendalian korupsi, tetapi menjadi landasan bagi roadmap pembangunan tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal organisasi publik



“Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan, melalui tata Kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Dan penegakan hukum harus tanpa pandang bulu – Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan 14 Agustus 2020



MANFAAT IEPK





PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

KERTAS KERJA PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES							Indeks KK No.				
Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grad.	Kriteria	Cara Pengujian	Pengujian terkait Tujuan 4 SPIP (Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan)	Kesimpulan Y/T
-	-	-	-	SP	MF	IEP	-	-	-	-	-
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika										
		2	Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi	SPIP	-	IEPK	A	Kebijakan antikorupsi menjangkau semua kegiatan dan terevaluasi terus-menerus oleh struktur pengelola risiko korupsi yang bekerja efektif dengan kewenangan dan tanggung jawab yang memadai sehingga pengembangan kebijakan antikorupsi yang berkelanjutan benar-benar dilakukan.	WD/O	Bahwa Telah	2
				SPIP	-	IEPK	B	Kebijakan antikorupsi telah nyata diimplementasikan pada semua kegiatan, namun belum ada reviu dan evaluasi terhadap efektivitasnya yang dilakukan secara formal dan terjadwal.			
				SPIP	-	IEPK	C	Kebijakan antikorupsi telah diimplementasikan, tetapi belum menjangkau semua kegiatan utama organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan risiko korupsi belum ditetapkan secara permanen di dalam struktur organisasi			
				SPIP	-	IEPK	D	Kebijakan antikorupsi yang terwujud dalam penetapan struktur pengelolaan risiko korupsi dan standar perilaku antikorupsi baru pada tataran terdiseminasi dan masih diterapkan secara parsial saja dan terbatas lingkungnya.			
				SPIP	-	IEPK	E	Kebijakan yang eksplisit untuk antikorupsi tidak ditetapkan, atau kalau pun ada, tidak berjalan sama sekali atau sekadar formalitas			
		3	Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons	SPIP	-	IEPK	A	SOP yang mencakup prinsip cegah deteksi dan respons telah diterapkan secara konsisten pada seluruh kegiatan dan ada evaluasi terjadwal dan dilakukan perbaikan berkelanjutan sehingga membawa perubahan nyata pada organisasi	WD/O	Bahwa Telah	3
				SPIP	-	IEPK	B	Penetapan SOP mencakup proses cegah deteksi dan respons telah dilaksanakan semuanya secara konsisten, meskipun reviu dan evaluasi atas pelaksanaan SOP masih dilakukan secara insidental			
				SPIP	-	IEPK	C	Penetapan SOP mencakup proses cegah deteksi dan respons telah dilaksanakan semuanya, meskipun masih kurang konsisten dan tidak ada reviu dan evaluasi atas efektivitas kegiatannya			
				SPIP	-	IEPK	D	Penetapan SOP antikorupsi belum mencakup tiga proses prinsip, atau mencakup kegiatannya tetapi hanya berjalan sebagian saja, atau masih berfungsi secara terbatas lingkungnya, pelaksanaan SOP masih cenderung seremonial			
				SPIP	-	IEPK	E	Tidak ada penetapan SOP antikorupsi spesifik. Kalau pun ada, tidak berfungsi			

KKE 1.2 SASTRA OPD

KKE 2.1 PROGRAM

KKE 2.2 KEGIATAN

KKE 2.3 SUB KEGIATAN

KKLEAD II

KK3.1

KK3.2

KK3.3

KK3.4

KKLEAD III

KK 5.1A

KK 5.1B

KK 5.2

KK 6



PENILAIAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI

Komponen Penilaian	Bobot	Referensi Parameter
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%	
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,6%	1.1.2
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,2%	1.1.3
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,2%	1.3.5
POWER (KUASA & WEWENANG)	14,4%	1.3.6
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,6%	1.1.4
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%	
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9%	2.2.6
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,6%	4.1.5
KEPEMIMPINAN ETIS	9%	1.3.7
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,2%	1.1.5
IKLIM ETIS PRINSIP	7,2%	1.1.6
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%	
INVESTIGASI	8%	1.1.7
TINDAKAN KOREKTIF	8%	1.1.8
TOTAL	100%	

KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI

KEBIJAKAN

1.1.2

ANTIKORUPSI: Pengendalian Kecurangan (CDR)

- Implementasi dari kebijakan tersebut
- Pedoman Pengelolaan Risiko
- Struktur Pengelola Risiko Kecurangan
- Standar perilaku antikorupsi (SOP Gratifikasi, Pakta Integritas,

Pendidikan karakter antikorupsi

SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI

1.1.3

SOP – pelaksanaan kegiatan

- SOP Pelaporan Internal
- SOP Monitoring & Evaluasi Kegiatan Antikorupsi

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1.3.5

- Anggaran Pengelolaan Risiko Kecurangan
- Penetapan Pegawai Pengelolaan Risiko Kecurangan
- Sarana & Prasarana Lainnya

POWER (KUASA & WEWENANG)

1.3.6

Pimpinan telah menampilkan sikap antikorupsi dalam bentuk :

- Dengan ikut langsung dalam kegiatan-kegiatan edukasi antikorupsi, pengelolaan risiko
- Keterlibatan dalam Satgas Pengendalian Kecurangan, Tim Saber Pungli.
- Mempertimbangkan adanya benturan kepentingan

PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI

1.1.4

- Telah dilaksanakan kegiatan pembelajaran anti korupsi
- Telah melibatkan pihak internal dan eksternal.
 - ✓ dalam lingkup internal : kepada seluruh pegawai di lingkungan pemerintah daerah.
 - ✓ Untuk pihak eksternal telah diadakan sosialisasi gratifikasi dan saberpungli, kegiatan2 yang sifatnya cegah

PENERAPAN STRATEGIS PENCEGAHAN

ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI

FRA - Asesmen risiko korupsi/Fraud pada Program,/Kegiatan OPD telah menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian OPD

- Pedoman Risiko kecurangan,
- Peta Risiko

SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL

Unit kerja menyelenggarakan sistem whistleblowing, dan dimanfaatkan secara konstruktif oleh pegawai & stakeholder, serta perlindungan kepada pelapor.

- WBS
- Implementasi adanya WBS

KEPEMIMPINAN ETIS

- Pimpinan telah berupaya memperlihatkan perilaku sesuai dengan kaidah atau standar etis yang berlaku di organisasi dalam aktivitas sehari-hari untuk menjadi role model,
- cukup terbuka mendiskusikan isu etis/ korupsi dengan bawahan dan berusaha mendorong semua bawahan untuk melaksanakan standar etis pada aktivitas sehari-hari di kantor meskipun masih ada sejumlah kekurangan dalam beberapa hal sehingga belum sepenuhnya konsisten.

INTEGRITAS ORGANISASIONAL

pengelolaan kegiatan, keuangan, dan sumberdaya manusia pada kegiatan utama telah mengarah pada transparansi dan mematuhi peraturan/hukum/standar profesional untuk menghindari praktik korupsi :
(Perencanaan anggaran, Rekrutmen pegawai)

IKLIM ETIS PRINSIP

- Bagaimana seorang pegawai mampu menempatkan ketaatan thd peraturan, sop, kode etik dan standar profesi

PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI

INVESTIGASI

- Seluruh Langkah investigatif (klarifikasi – pelaksanaan audit investigasi)
- Mengukur bekerjanya prinsip respon pengelolaan risiko kecurangan
- efektifitas respon
- kualitas respon (kecepatan respon, kompetensi & independensi tim respon)
- Berkas Penugasan Audit Investigasi, sertifikat kompetensi APIP)

TINDAKAN KOREKTIF

Seluruh Langkah yang diambil untuk memperbaiki kerusakan yang timbul akibat praktik korupsi, meliputi:

- Memastikan perbuatan tak benar dihentikan dan tidak terulang;
- Mengambil Langkah konstruktif berupa penguatan sistem internal (Tindak lanjut hasil audit investigasi)

PERISTIWA KORUPSI



UPAYA PENINGKATAN IEPK

FCP

Pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah & menangkal, mendeteksi, dan merespon kejadian berindikasi *fraud*

FRA

proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan yang relevan dengan organisasi. Penilaian ini membahas risiko kecurangan pelaporan keuangan, kecurangan pelaporan non-keuangan, penyelewengan aset, dan tindakan ilegal lainnya (termasuk korupsi)

MPAK

Metode yang digunakan untuk mengubah paradigma/mindset masyarakat (ASN, masyarakat sipil) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang sebelumnya hanya bersifat perbaikan system (preventif) dan penegakan hukum (represif) menjadi lebih bersifat edukatif dengan menempatkan proses belajar sebagai factor kunci keberhasilan pemberantasan korupsi

AUDIT INVESTIGATIF/AUDIT
TUJUAN TERTENTU

COACHING CLINIC BID
PENGAWASAN INVESTIGASI



Hadir Bermanfaat!

